



BAB IV

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Kejadian krisis ekonomi periode 1997 / 1998 dan krisis finansial global dewasa ini menjadi pelajaran yang sangat berharga baik dilingkup nasional maupun daerah. Krisis ini secara tidak langsung menghendaki adanya perubahan kearah yang lebih baik, semuanya menuntut pemecahan masalah yang lebih sistematis dan konsisten.

Hingga tahun 2009 Kabupaten Lombok Barat masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan ini terjadi karena peningkatan kesejahteraan tidak dinikmati secara merata (adil) oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Lombok Barat. Permasalahan dan tantangan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu Tahun 2010 – 2014 akan menentukan agenda, sasaran serta program pembangunan yang bersifat lintas kaitan dan lintas koordinasi. Oleh karena itu pada tahun 2010 – 2014 Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bertekad untuk melakukan pemerataan pembangunan beserta hasil – hasilnya secara adil dan merata guna mewujudkan peningkatan masyarakat, sehingga dalam peningkatan kesejahteraan tersebut juga terwujud keadilan. Keadilan dan kesejahteraan tidak hanya menjadi isu lokal Kabupaten Lombok Barat, namun sudah menjadi isu nasional bahkan internasional / global. Isu – isu strategis yang berkaitan dengan keadilan dan kesejahteraan ditingkat daerah, nasional dan internasional / global, yaitu :

A. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS LINGKUP INTERNASIONAL

1. Keadilan dan Kesejahteraan

Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) telah mendeklarasikan Hak – Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 dimana setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dalam bidang ekonomi, social seperti pendidikan dan kesehatan, budaya dan politik. Dalam implementasinya hak – hak asasi manusia tersebut hingga saat ini masih diwarnai ketidakadilan. Meskipun kesejahteraan global mengalami peningkatan, namun kesejahteraan tersebut tidak dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh golongan penduduk.

Berdasarkan Human Development Report (2008) di negara – negara berkembang dimana sebagian besar pendapatan nasional (63%) hanya dinikmati oleh lapisan terkaya dan sebagian kecil (37%) yang dinikmati oleh lapisan menengah dan miskin. Sebagian besar penduduk (90%) termasuk lapisan menengah dan miskin serta hanya



sebagian kecil (10%) yang termasuk lapisan kaya. Hal ini menggambarkan ketidakadilan dalam kesejahteraan dimana sebagian besar pendapatan nasional dinikmati oleh segelintir orang kaya, sementara sebagian besar mereka yang tergolong lapisan menengah dan miskin hanya menikmati sebagian kecil dari pendapatan nasional. Disisi lain, ketidakadilan dalam kesejahteraan ini juga terjadi di Negara – Negara industri maju dimana pendapatan nasional dinikmati oleh golongan penduduk kaya (20%) mencapai 11 kali lebih tinggi dari 20% golongan penduduk miskin.

Dalam kurun waktu 2004 – 2007 Indonesia mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi rata – rata 5,75%, tetapi kesejahteraan (pertumbuhan ekonomi) tersebut belum dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat yang ditunjukkan dengan meningkatnya Gini ratio dari 32,2 menjadi 34,8. Kesejahteraan tidak hanya menyangkut komponen ekonomi akan tetapi juga menyangkut pendidikan dan kesehatan. Ketiga komponen tersebut secara komposit tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Mengacu pada Human Development Report (2008) IPM rata – rata Indonesia dalam periode 2003 – 2006 sebesar 71,7 dan berada pada peringkat ke 118 dari 179 negara. Ketidakadilan lainnya adalah ketimpangan gender yang digambarkan oleh Indeks Pengembangan Gender (IPG) dan menurut Human Development Report (2005) bahwa IPG Indonesia menduduki peringkat ke 87 dari 104 negara.

Isu penting lainnya dalam pembangunan manusia adalah Millenium Development Goals (MDG's) yang merupakan paradigma pembangunan global dimana Indonesia pada bulan September 2000 telah menyepakati Deklarasi Millenium bersama dengan 189 negara anggota PBB. Deklarasi ini menghimpun komitmen dari para pemimpin dunia untuk menangani masalah perdamaian, keamanan, pembangunan, hak asasi dan kebebasan fundamental dengan merumuskan tujuan pembangunan millennium atau yang lebih populer dengan Millenium Development Goals (MDG's) yang disepakati dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2015 kedalam delapan pokok penting, yaitu : (1) menghapuskan tingkat kemiskinan dan kelaparan, (2) mewujudkan pendidikan dasar secara universal, (3) mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan, (4) mengurangi angka kematian anak, (5) meningkatkan kesehatan ibu, (6) memerangi HIV / AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, (7) memastikan keberlanjutan lingkungan hidup dan (8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

2. Degradasi Lingkungan

Dalam dua dekade terakhir, berdasarkan Human Development Report (2008) luas hutan tropis yang mengalami kerusakan di Amerika Latin dan Karibia mencapai 7 milyar hektar dan 4 juta hektar di Asia dan Afrika. Hutan tropis memiliki peran penting dalam menyerap emisi karbondioksida (CO₂) yang berasal dari negara – negara industri maju yang memberikan kontribusi sekitar 53 % terhadap emisi CO₂. Disisi lain, negara – negara berkembang yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap CO₂ antara lain negara Brazil, India, Meksiko dan Indonesia. Konsekuensi dari emisi CO₂ ini adalah terjadinya pemanasan global (global warming) yang dapat menyebabkan peningkatan permukaan air laut, sehingga wilayah – wilayah tertentu dilanda banjir akibat pasang naik, terjadinya anomali musim (El Nino dan La Nina), banjir, menurunkan produktivitas pertanian dan mengakibatkan bencana alam. Ancaman terjadinya bencana kerusakan lingkungan akibat pemanasan global ini menuntut adanya komitmen masyarakat dunia atas penyelamatan bumi (*save the planet*).

Hutan tropis tidak hanya menjadi paru – paru dunia, melainkan juga berfungsi untuk mendukung ketersediaan air. Akibat tingginya laju kerusakan hutan, pada tahun 2002 ketersediaan air dunia menjadi turun secara drastis dari 16.800 m² perkapita setiap tahun menjadi 7.300 m³ pada tahun 2007. Disisi lain sekitar 30 % penduduk dunia (lebih dari 1,3 milyar) tidak memiliki akses terhadap air bersih dan sekitar 60 % (lebih dari 2,5 milyar) tidak memiliki akses terhadap sanitasi dasar. Pencemaran air menyebabkan 20 % penduduk dunia menderita diare dan disentri. Setiap tahun pencemaran air menimbulkan 2 milyar kasus diare di negara – negara berkembang (termasuk Indonesia), yang menyebabkan kematian 5 juta orang (termasuk 3 juta anak – anak).

Berkaitan dengan uraian diatas, maka pembangunan menghendaki terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan (sustainable development) agar kesejahteraan dapat dinikmati secara adil dan tidak hanya oleh generasi sekarang, melainkan juga generasi mendatang.

3. Energi

Dari aspek kelistrikan, total tenaga listrik dunia yang mencapai 12.875 milyar Kwh, sebagian besar (72,23%) dinikmati oleh negara – negara industri maju dan hanya 27,77% yang dinikmati oleh negara – negara berkembang. Berdasarkan Human Development Report pada tahun 2008 konsumsi listrik per kapita Indonesia sebesar 476 Kwh dan Indonesia menduduki peringkat ke 107 dari 177 negara. Laju kelistrikan Indonesia (54%) juga berada pada peringkat 107 dari 177 negara. Kondisi ini

menggambarkan bahwa Indonesia mengalami krisis energi listrik dimana terjadi kesenjangan antara pasokan (supply) dan permintaan (demand) tenaga listrik.

4. Good Governance

Menguatnya kualitas demokrasi dan tuntutan globalisasi menghendaki terwujudnya reformasi birokrasi ke arah tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di negara – negara berkembang (termasuk Indonesia) berdasarkan prinsip – prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan penegakan hukum. Partisipasi dimaksud mendorong masyarakat untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan partisipatif adalah salah satu bentuk partisipasi langsung. Dalam pada itu, keterlibatan warga masyarakat dalam pemilihan umum (Pemilu) merupakan partisipasi tidak langsung.

Transparansi adalah menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Informasi merupakan suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan pembangunan daerah. Akuntabilitas berkaitan dengan peningkatan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Pembuat kebijakan pada semua tingkatan harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat dan untuk mengukurnya perlu adanya indikator yang jelas.

Penegakan hukum adalah mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat. Prinsip ini berkaitan dengan upaya mengurangi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan pelanggaran hukum.

5. Krisis Perekonomian Global

Pada penghujung tahun 2008 perekonomian dunia dilanda krisis ekonomi global akibat dari krisis ekonomi yang melanda negara Amerika Serikat. Krisis tersebut berdampak terhadap terjadinya krisis ekonomi di negara – negara industri maju lainnya. Akibat krisis tersebut, volume ekspor dari negara – negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia dan Thailand ke negara – negara industri maju jauh berkurang. Diperkirakan pertengahan tahun 2009 perusahaan – perusahaan baik di



Indonesia dan Malaysia yang tergantung pada ekspor bakal berhenti operasinya, sehingga banyak tenaga kerja yang bakal terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Di sisi lain hingga saat ini banyak tenaga kerja asal Kabupaten Lombok Barat yang bekerja sebagai buruh migrant di Malaysia. Akibat krisis global yang terjadi dewasa ini, maka Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di negara Malaysia (termasuk buruh migrant asal Kabupaten Lombok Barat) juga bakal terkena PHK masal. Hal ini merupakan permasalahan baru bagi Pemerintah Daerah yang memerlukan pemecahan, untuk itu perlu dilakukan revitalisasi pertanian dalam arti luas meliputi peternakan, perkebunan dan perikanan sebagai sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja.

B. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS LINGKUP NASIONAL

1. Tingginya Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran

Tingginya angka kemiskinan dan angka pengangguran merupakan permasalahan yang sangat serius yang dihadapi oleh pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah kabupaten / kota, termasuk pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Jumlah penduduk miskin di Indonesia dengan kriteria MDG's yaitu mereka yang berpenghasilan kurang dari 1 US\$, dan sebanyak lebih kurang 16,5 juta jiwa atau lebih kurang 7,5%.

2. Krisis Energi Nasional

Melambungnya harga minyak dunia pada akhir tahun 2007 sampai dengan pertengahan tahun 2008 dan kecenderungan semakin terbatasnya energi fosil tersebut telah memicu terjadinya krisis energi yang memerlukan perhatian serius semua pihak. Krisis energi yang terjadi di Indonesia ternyata tidak hanya terjadi pada energi primer saja namun juga terjadi pada energi sekunder dalam hal ini kelistrikan. Tidak terjaminnya kontinuitas pasokan batu bara pada pembangkit PLTU milik PT. PLN (Persero) menyebabkan berkurangnya pasokan listrik, sehingga pemadaman bergilir tidak bisa dihindari hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas masyarakat dan menyebabkan rendahnya daya tarik bagi calon investor yang akan menanamkan modalnya.

3. Tuntutan Good Governance

Tingkat good governance yang dicapai Indonesia (2,8) paling rendah dibandingkan negara – negara ASEAN seperti singapura (8,9), Malaysia (7,7), Thailand (4,8) dan Filipina (3,47). Untuk itu good governance tersebut kedepan perlu diwujudkan, tidak hanya sekedar spirit. Berkaitan hal tersebut, implementasi otonomi daerah hendaknya



dilaksanakan dalam konteks local good governance. Pretek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan lemahnya penegakan hukum mengindikasikan masih lemahnya implementasi good governance ditingkat nasional maupun daerah.

4. Penurunan Kualitas Lingkungan dan Peningkatan Frekuensi Serta Intensitas Bencana Alam

Penurunan kualitas lingkungan akibat pengrusakan hutan, pencemaran lingkungan oleh aktivitas industri, merupakan isu yang harus disikapi dengan program – program pembangunan yang sesuai. Meningkatnya frekuensi kejadian berbagai jenis bencana alam dengan skala dan intensitasnya mengharuskan pemerintah (pusat dan daerah) menyusun rencana aksi yang sistematis dan konkrit mulai dari pra bencana, pada saat tanggap darurat dan pada pasca terjadinya bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi).

Kejadian bencana banjir yang terjadi pada awal tahun 2009 di Kabupaten Lombok Barat memberikan pelajaran yang sangat berharga akan keharusan untuk segera menyusun rencana aksi yang sistematis dan konkrit.

5. Ancaman Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Pesta demokrasi yaitu pemilu legislatif dan suksesi kepemimpinan nasional melalui pemilihan Presiden / Wakil Presiden Republik Indonesia akan dilaksanakan pada tahun 2009. Peristiwa ini akan berpotensi untuk menimbulkan gejolak kerawanan di masyarakat, oleh karena itu perlu upaya – upaya untuk mengurangi resiko terjadinya ancaman stabilitas dan ketentraman masyarakat.

Stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat perlu mendapatkan perhatian, berdasarkan data Polres Kabupaten Lombok Barat kasus yang berkaitan dengan gangguan kamtibmas di Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2007 – 2008 kecenderungan mengalami kenaikan, yaitu 318 kasus pada tahun 2007 menjadi 697 kasus pada tahun 2008.

6. Penanggulangan Bahaya Narkoba

Penggunaan narkoba oleh masyarakat khususnya anak – anak muda saat ini sudah dalam taraf memprihatinkan dan perlu penanganan yang lebih serius dari pemerintah. Peredaran narkoba telah menembus antar wilayah di Indonesia, bahkan telah merambah ke wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penanggulangan bahaya narkoba sudah dilakukan dengan gencar, bahkan masing – masing daerah telah membentuk Badan Narkotik Daerah seperti BNP dan BNK. Namun bahaya narkoba tetap saja mengancam karena pelaku peredaran narkoba diberbagai tempat semakin



professional. Oleh karena itu penanggulangan bahaya narkoba baik sebelum maupun sesudah mengkonsumsi narkoba harus tetap digalakkan.

7. Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Korupsi, Koluasi dan Nepotisme (KKN) telah merebak dan menjadi isu nasional bahkan telah menjadi momok bagi masyarakat Indonesia. KKN tidak hanya terjadi di pemerintahan pusat, juga terjadi di pemerintahan kabupaten / kota di seluruh wilayah Indonesia. KKN benar – benar mendapat perhatian yang serius dari pemerintah dan diwujudkan dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun KKN masih tetap merajalela. Upaya – upaya pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN dilakukan melalui penegakkan hukum, peningkatan pengawasan dan pelayanan terpadu dalam pelayanan publik.

8. Keadilan dan Kesetaraan Gender

Keadilan dan kesetaraan gender menjadi isu yang cukup mendapat perhatian, namun demikian pencapaian keadilan dan kesetaraan gender bukanlah hal yang mudah. Banyak kasus yang menjadi bukti bahwa dampak dari pembangunan telah mengakibatkan ke tidakadilan dan ke tidak setaraan gender. Dua indikator yaitu : (1) angka Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Indeks / HDI) yang merupakan index komposit dari komponen pendidikan, kesehatan dan ekonomi, (2) Gender Related Development Index (GDI). Menurut HDR 2005, Indonesia berada pada peringkat HDI ke 110 dari 170 negara di dunia, dengan indeks sebesar 69,7 sedangkan GDI menduduki peringkat ke 87 dari 140 negara di dunia dengan indeks sebesar 69,1. Perbedaan angka HDI dan GDI merupakan indikasi adanya kesenjangan gender.

Kesenjangan gender (rasio wanita / laki – laki) di negara – negara industri maju mencapai 1,05 lebih tinggi dari negara – negara berkembang dengan rasio wanita / laki – laki sebesar 0,93 dimana fenomena ini terjadi karena usia harapan hidup dan angka kematian bayi di negara – negara maju lebih tinggi dibandingkan negara – negara berkembang.

Makin menyempitnya penguasaan lahan pertanian di Kabupaten Lombok Barat menyebabkan terbatasnya peluang kerja, sehingga laki – laki mengadu nasib sebagai buruh migran untuk bekerja keluar negeri seperti Malaysia dan Arab Saudi, ementara wanita biasanya tetap di rumah. Kalaupun ada wanita yang bekerja sebagai buruh



migran, jumlahnya lebih kecil dibandingkan laki – laki. Fenomena inilah yang menyebabkan tingginya rasio wanita / laki – laki di Kabupaten Lombok Barat.

9. Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

Kesejahteraan dan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (UU Nomor 23 tahun 2002). Dalam pengertian ini tersirat bahwa anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi, Namun fakta menunjukkan banyak anak menghadapi berbagai permasalahan.

Meningkatnya persentase anak dengan gizi buruk dari 8,3 persen menjadi 10,1 % atau dari 1,8 juta pada tahun 2004 menjadi 2,3 juta pada tahun 2006. Angka Partisipasi Murni (APM) SD 95% dan APM 67% atau 28% putus sekolah dan rata– rata anak Indonesia bersekolah 6,7 tahun. Fakta lain kasus–kasus kekerasan pada anak meningkat, kasus anak diperdagangkan meningkat, pekerja anak masih tinggi, anak jalanan sulit dikendalikan, anak pemakai narkoba meningkat dan masalah–masalah perlindungan khusus lainnya. Sementara itu, Departemen Kesehatan mencatat 154 bayi terinfeksi HIV / AIDS dan ratusan anak remaja terinfeksi HIV / AIDS.

C. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS LINGKUP DAERAH

Berdasarkan uraian gambaran umum seperti di atas dapat dirumuskan isu strategis dalam pembangunan yang harus menjadi perhatian dalam 5 (lima) tahun mendatang. Hingga tahun 2008 Kabupaten Lombok Barat masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan atau isu – isu strategis diantaranya :

1. Kurang Terintegrasinya Keragaman Agama, Sosial dan Budaya.

Kerukunan kehidupan intern umat dan antar umat beragama masih dirasa cukup baik, walupun dalam beberapa hal masih ada konflik SARA berupa perkelahian antar kampung, terjadinya persepsi berbeda terhadap agama dan pengrusakan fasilitas negara. Kondisi gangguan kamtibmas terjadi kesalahpahaman masyarakat dan pengrusakan atas sarana dan fasilitas aparat dan gangguan kamtibmas sebanyak 2 (dua) kasus. Pada tahun 2006 juga meningkat dua kali lipat gangguan kamtibmas yang disebabkan oleh perkelahian antar warga kampung dan pengerusakan hak milik negara, begitu juga ditahun 2007 terjadi 4 (empat) kasus gangguan kamtibmas yang disebabkan oleh SARA dan perkelahian antar warga. Ditahun 2008 mengalami penurunan menjadi 3 (tiga) kasus gangguan kamtibmas yang disebabkan kurang



pemahaman masyarakat terhadap aturan, penyerangan sarana dan fasilitas negara dan kerusuhan SARA.

2. Terjadinya Peningkatan Gangguan Sosial Akibat Kurangnya Pemahaman Demokratisasi, Terkikisnya Pertimbangan Moral dan Etika ditengah Komponen Masyarakat.

Peningkatan gangguan stabilitas keamanan dan gangguan sosial akibat proses demokratisasi dan kurangnya pemahaman akan keberagaman seringkali terjadi di Kabupaten Lombok Barat, sehingga masalah ini menjadi bersifat strategis untuk mendapat perhatian sebagai upaya memberikan pembinaan dan pemberdayaan terhadap proses demokratisasi di Kabupaten Lombok Barat.

3. Kurang Optimalnya Pelayanan Pendidikan Masyarakat dan Tingginya Buta Aksara

Pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mampu memenuhi hak – hak dasar masyarakat. Sampai dengan tahun 2008 rata – rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas baru mencapai 5,80 tahun. Sementara itu angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas baru mencapai 74,00%. Angka Putus Sekolah (APS) – rasio penduduk yang bersekolah menurut Tingkat Pendidikan SD/MI mencapai 0,12%, APS Tingkat Pendidikan SMP/MTs mencapai 0,1% dan APS Tingkat Pendidikan SMA/SMK mencapai 0,03 %. Tantangan tersebut menjadi semakin berat dengan adanya disparitas tingkat pendidikan antar kelompok masyarakat yang masih cukup tinggi. Kualitas pendidikan juga masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kurang dan belum meratanya pendidik baik secara kuantitas maupun kualitas serta kesejahteraan pendidik yang juga masih rendah. Disamping itu juga fasilitas belajar yang masih belum tersedia secara memadai.

4. Rendahnya Derajat Kesehatan dan Status Gizi Masyarakat

Pembangunan dibidang kesehatan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Lombok Barat belum sepenuhnya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hal ini tercermin dari masih tingginya angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan dan kurang gizi atau gizi buruk pada balita, disamping itu juga masih minimnya tenaga kesehatan sehingga dapat mempengaruhi terhadap layanan kesehatan masyarakat. Pada tahun 2008 Usia Harapan Hidup (UHH) baru mencapai 59,8 tahun, Angka Kematian Bayi (AKB) mencapai 16,29 per 1.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Ibu (AKI) mencapai 137,85 per 100.000 kelahiran hidup, angka gizi buruk mencapai 3,11%.



Ketersediaan prasarana dan tenaga kesehatan yang terbatas ikut berpengaruh terhadap rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Pada tahun 2008 tercatat tenaga kesehatan baru tersedia 740 orang dengan tingkat ratio per 100.000 orang penduduk yang masih cukup rendah dibandingkan standard nasional. Ratio tenaga kesehatan adalah sebagai berikut : dokter umum 4,08 (standard nasional 40), dokter gigi 2,20 (standard nasional 11), perawat 33,66 (standard nasional 117,5), bidan 23,16 (standard nasional 100), tenaga gizi 8,29 (standard nasional 22), sanitarian 5,14 (standard nasional 40), tenaga farmasi 2,45 (standard nasional 10), dan sarjana kesehatan masyarakat 4,29 (standard nasional 40).

5. Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi dan Tingginya Angka Kemiskinan

Rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah yang rendah dapat menyebabkan kemampuan daerah untuk menciptakan lapangan pekerjaan menjadi sangat terbatas, sehingga dapat mengakibatkan rendah dan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat, meningkatnya penduduk miskin dan dapat memunculkan berbagai masalah sosial yang sangat mendasar. Dari jumlah angkatan kerja di Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2008 yaitu 379.025 orang yang mampu terserap pada lapangan kerja yang tersedia hanya 352.580 orang (93,02 %), sedang selebihnya sebanyak 26.445 Orang (6,98 %) tergolong sebagai pengangguran terbuka.

Disamping itu juga rendahnya pertumbuhan ekonomi dapat mengakibatkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lombok Barat masih sangat banyak, persentase penduduk miskin pada tahun 2007 sebesar 30,23 %, kemudian pada tahun 2008 sekitar 147.696 jiwa atau 18,12 % dari total penduduk 816.523 jiwa. Dalam penanggulangan kemiskinan, permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi adalah kurangnya pemahan terhadap hak – hak dasar masyarakat miskin, kurangnya pemahaman terhadap akar masalah yang dihadapi masyarakat miskin, kurangnya pemahaman terhadap perbedaan kondisi kemiskinan di berbagai wilayah, kurangnya ketersediaan data untuk mendukung penentuan sasaran dan kelompok sasaran secara akurat, lemahnya koordinasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, lemahnya koordinasi antar pelaku pembangunan dan lemahnya sistim pemantauan, evaluasi dan pengendalian.

6. Masih Rendahnya Daya Tarik Daerah bagi Investor terutama Sektor Andalan

Dari kondisi faktual yang terjadi dalam beberapa kurun waktu di Kabupaten Lombok Barat, nilai investasi ekonomi terutama untuk sektor andalan masih sangat minim. Hal ini terjadi sebagai agregat dari masalah ekonomi, infrastruktur dan kondusivitas



keamanan daerah yang belum optimal. Hal ini juga terkait dengan masih minimnya kerangka informasi dan regulasi yang baik untuk menarik investasi ke wilayah Kabupaten Lombok Barat.

7. Rendahnya Kemampuan Pelayanan Infrastruktur Daerah untuk Investasi dan Pelayanan Umum

Tantangan pembangunan yang dihadapi pembangunan infrastruktur saat ini tidaklah ringan. Krisis global berupa tingginya harga minyak dunia dan melonjaknya harga pangan dunia, berdampak pada meningkatnya biaya pembangunan infrastruktur. Namun demikian pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat terus berupaya untuk menyediakan infrastruktur yang memadai dan berkualitas. Tersedianya infrastruktur yang memadai pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Di Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2008 pada bidang infrastruktur transportasi darat (jalan) dari 371,48 km jalan yang ada ternyata yang kondisinya baik hanya 156,60 km (35,07 %) selebihnya dalam kondisi sedang 68,98 km (15,45 %), rusak 96,78 km (21,68 %) dan rusak berat 124,12 km (27,80 %). Kondisi infrastruktur yang rusak dan rusak berat ini sepanjang 220,90 km dari seluruh jalan yang ada Kabupaten Lombok Barat.

Pada bidang infrastruktur transportasi laut, jumlah pelabuhan laut yang ada yaitu 4 buah meliputi pelabuhan Lembar, Senggigi, Bangko – Bangko dan Teluk Sepi. Upaya mewujudkan penambahan pelabuhan juga sedang dirintis yaitu pelabuhan wisata di Tawon Sekotong.

Pada bidang irigasi, kemampuan jaringan irigasi yang telah dibangun belum sepenuhnya mampu melayani kebutuhan masyarakat akan irigasi. Begitu juga pada bidang infrastruktur lainnya seperti pelayanan air minum (PDAM) baru terjangkau 19.464 buah pelanggan dengan jumlah air bersih yang disalurkan sebanyak 5.919.945 m³.

Sedangkan untuk kelistrikan, kemampuan pelayanan listrik yang dilaksanakan oleh PLN sampai saat ini masih sangat terbatas. Daya terpasang mesin pembangkit yang ada baru mencapai 184.494.451 VA dengan Kwh terjual sebanyak 375.617.865 Kwh, sehingga baru bisa memberikan pelayanan listrik kepada 209.161 jumlah pelanggan, hal ini memperlihatkan betapa masih banyaknya warga masyarakat yang belum menikmati pelayanan infrastruktur listrik. Untuk mengantisipasi kekurangan pasokan



listrik tersebut Pemerintah Kabupaten Lombok Barat akan menambah pasokan energi listrik melalui pembangunan : Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeranjang dengan potensi 75 Mega Watt, yang berlokasi pada Dusun Jeranjang, Desa Kebon Ayu Kecamatan Gerung. Selain itu juga untuk membantu penyediaan listrik di wilayah pedesaan, beberapa program pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit listrik Tenaga Mikrohydro (PLTMH) sudah dilakukan di beberapa wilayah Kabupaten Lombok Barat.

8. Masih Rendahnya Produktivitas dan Produksi Pertanian

Kontribusi pertanian terhadap PDRB Kabupaten Lombok Barat cenderung menurun dari tahun 2002 sebesar 35,81% menjadi 33,36% tahun 2006 dan pada tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar 33,99%. Namun secara keseluruhan dilihat kecenderungan atau trend perkembangan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Lombok Barat terus mengalami penurunan yang signifikan, mengacu pada hal tersebut maka perlu adanya revitalisasi sektor pertanian agar dapat meningkatkan kontribusi sektor pertanian serta meningkatkan kesejahteraan petani.

9. Rendahnya Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup serta Terjadinya Peningkatan Frekwensi Bencana Alam

Sumberdaya alam dan lingkungan hidup adalah penopang keberlanjutan kehidupan manusia tetapi karena kemampuan pengelolaannya yang masih rendah menyebabkan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup menjadi semakin memburuk, hal ini terlihat dari makin meningkatnya luas lahan kritis baik diluar kawasan hutan maupun di dalam kawasan hutan. Pada tahun 2008 luas lahan kritis di Kabupaten Lombok Barat tercatat 32.624,18 ha yang terdapat dalam kawasan hutan telah mencapai 16.363,60 ha dan diluar kawasan hutan 16.260,58 ha.

Jumlah mata air dan debit air di Kabupaten Lombok Barat terus mengalami penurunan, hal ini disebabkan tingginya laju perubahan guna lahan (konversi lahan) dan penebangan hutan secara liar pada daerah tangkapan air (*catchment area*) dan daerah aliran sungai. Menurut kondisi eksisting, wilayah jumlah mata air pada tahun 2008 berjumlah 146 buah yang tersebar di Kecamatan Batulayar 7 buah, Gunungsari 23 buah, Lingsar 35 buah, Narmada 81 buah. Dari 146 buah mata air yang ada sebanyak 138 mata air mempunyai debit sebesar 1 – 50 lt/det, 5 mata air mempunyai debit 51 – 100 lt/det dan 3 mata air mempunyai debit di atas 100 lt/det.

Kualitas air sungai yang ada juga mengalami penurunan karena terjadi pencemaran terhadap badan sungai tersebut. Terjadinya pencemaran terhadap badan sungai



tersebut bukan karena terbatasnya kemampuan pemerintah Kabupaten Lombok Barat semata dalam mengolah bahan pencemaran seperti sampah dan limbah rumah tangga, namun juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya badan sungai sebagai penopang keberlanjutan kehidupan, yang mana sungai sering dianggap sebagai tempat pembuangan akhir baik limbah rumah tangga maupun limbah domestik.

Kualitas sumberdaya pesisir dan kelautan juga telah mengalami penurunan. Luas hutan mangrove yang sangat bermanfaat bagi zona pemijahan (nursery ground) terus menerus semakin berkurang sebagai akibat penebangan liar dan pemukiman penduduk. Demikian juga dengan luas dan kualitas terumbu karang yang ada. Kerusakan terumbu karang masih terus berlangsung baik karena dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kapur bangunan tetapi juga karena pengeboman ikan dan pencemaran air laut dari buangan limbah industri dan rumah tangga.

Tidak menyatunya kegiatan perlindungan fungsi lingkungan hidup dengan kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam sering melahirkan konflik kepentingan antara ekonomi (pertambangan dan kehutanan) dengan lingkungan. Kebijakan ekonomi selama ini cenderung lebih berpihak terhadap kegiatan eksploitasi sumberdaya alam sehingga mengakibatkan lemahnya kelembagaan pengelolaan dan penegakkan hukum. Selain itu juga tingginya intensitas frekwensi bencana alam, baik yang bersifat alami seperti bencana geologis maupun bencana yang terjadi sebagai akibat eksploitasi dan intervensi berlebih terhadap keseimbangan lingkungan.

10. Belum Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan Secara Baik (Good Governance) dan Rendahnya Penegakan Hukum.

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat sampai saat ini belum dapat berjalan sesuai dengan prinsip – prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik, hal ini terlihat dari lamban dan kurang transparannya berbagai pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Faktor penyebab terjadinya hal tersebut antara lain rendahnya kemampuan SDM Aparatur Daerah, belum adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM). terbatasnya sarana pelayanan yang tersedia, penempatan aparatur pada bidang tugas yang kurang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya, belum optimalnya sistim kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan dan masih rendahnya kesejahteraan aparatur pemerintah. Akibat daripada kesemua permasalahan tersebut menjadikan rendahnya kualitas dan aktivitas kinerja aparatur daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.



11. Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Terjadinya Kesenjangan Kesetaraan Gender

Kualitas pembangunan ditunjukkan dengan tingkat akseptibilitas hasil pembangunan oleh masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat merupakan modal pembangunan yang paling strategis dalam distribusi dan peningkatan hasil pembangunan. Salah satu elemen penting didalam partisipasi masyarakat ini dapat dilihat dari tingkat kesenjangan kesetaraan gender dalam pembangunan. Di Kabupaten Lombok Barat kualitas partisipasi masyarakat masih kurang optimal. Hal ini terlihat pada keikutsertaan masyarakat dalam mengakses dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Demikian halnya dengan kesetaraan gender dalam pembangunan. Tingkat partisipasi dan kesetaraan gender masih terkendala oleh kondisi sosial-budaya, oleh karena strategi dan terobosan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, dapat dirumuskan isu – isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat dalam kurun waktu lima tahun ke depan (periodesasi 2010 -2014), yaitu :

1. Kurang terintegrasinya keragaman agama, sosial budaya.
2. Terjadinya peningkatan gangguan social akibat kurangnya pemahaman demokratisasi, terkikisnya pertimbangan moral dan etika ditengah komponen masyarakat.
3. Kurang optimalnya pelayanan pendidikan masyarakat dan tingginya angka buta aksara.
4. Rendahnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat.
5. Rendahnya pertumbuhan ekonomi dan tingginya angka kemiskinan serta pengangguran.
6. Masih rendahnya daya tarik daerah bagi investor terutama sektor andalan.
7. Rendahnya Kemampuan Pelayanan Infrastruktur Daerah untuk Investasi dan Pelayanan Umum
8. Masih rendahnya produktivitas dan produksi pertanian
9. Rendahnya Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.
10. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan secara baik dan rendahnya penegakan hukum.
11. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan terjadinya kesenjangan kesetaraan gender

Tabel 4.1

Issu – Issu Strategis dan Agenda Prioritas Pembangunan

No	Issu – Issu Strategis	Agenda Prioritas Pembangunan
(1)	(2)	(3)
1	Kurang terintegrasinya keragaman agama, sosial budaya	Peningkatan kualitas beragama dan kerukunan hidup beragama serta peningkatan peran lembaga keagamaan maupun budaya dalam pembangunan
2	Terjadinya peningkatan gangguan social akibat kurangnya pemahaman demokratisasi, terkikisnya pertimbangan moral dan etika ditengah komponen masyarakat.	Peningkatan dan penguatan kelembagaan social masyarakat sebagai mediasi perubahan dan kontrol social
3	Kurang optimalnya pelayanan pendidikan masyarakat dan tingginya angka buta aksara	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan terutama bagi masyarakat miskin dan pengentasan buta aksara secara berkelanjutan
4	Rendahnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan berkualitas terutama bagi masyarakat miskin
5	Rendahnya pertumbuhan ekonomi dan tingginya angka kemiskinan serta pengangguran	Penanggulangan masalah kemiskinan dan pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatnya pertumbuhan ekonomi
6	Masih rendahnya daya tarik daerah bagi investor terutama sektor andalan	Peningkatan kualitas pelayanan dan jaminan berinvestasi terutama pada sektor andalan
7	Rendahnya Kemampuan Pelayanan Infrastruktur Daerah untuk Investasi dan Pelayanan Umum	Peningkatan jangkauan pelayanan dan kualitas infrastruktur dengan mengembangkan pola keterpaduan antar wilayah dan antar sektor
8	Masih rendahnya produktivitas dan produksi pertanian dalam arti luas.	Revitalisasi bidang pertanian dalam arti luas meliputi peternakan, perkebunan, perikanan dan kelautan
9	Rendahnya Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup serta terjadinya peningkatan frekwensi bencana alam	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan pelestarian lingkungan hidup berbasis daya dukung lingkungan dan responsifitas terhadap bencana alam
10	Belum Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan Secara Baik (Good Governance) dan Rendahnya Penegakan Hukum.	Mengoptimalkan kualitas pelayanan publik dan pengawasan publik kinerja pembangunan dan Penegakkan supremasi hukum dengan meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum
11	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan terjadinya kesenjangan kesetaraan gender	Peningkatan peran masyarakat dan peningkatan kualitas kehidupan perempuan serta pemberdayaan dalam pembangunan, politik dan jabatan publik